

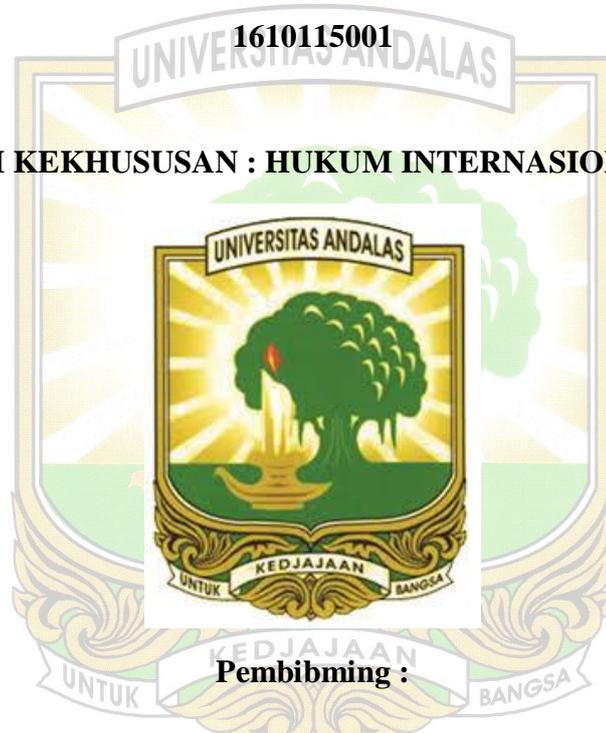
SKRIPSI
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
STUDI TERHADAP PERAN DINAS KETENAGAKERJAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

Oleh:

DYNKA GUSTI CHALIA AMEL

1610115001

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)



Pembimbing :

Dr. Dian Bakti Setiawan, S.H., M.H

Beni Kharisma, S.HI., LLM

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

**PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR
NEGERI STUDI TERHADAP PERAN DINAS
KETENAGAKERJAAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

*(Dynka Gusti Chalia Amel, 1610115001, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 2021, 82 halaman)*

ABSTRAK

Pengaturan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pertama dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dimana didalam Undang-Undang tersebut menjelaskan mengenai penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri.. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah *pertama* bagaimana konsep perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ditinjau dari segi perundang-undangan, dan yang *kedua* adalah Peran Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat dalam hal perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri . Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait permasalahan kemudian menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan pengambilan data. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan antara lain : 1) Perkembangan pengaturan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pertama dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Dimana didalam UU tersebut perlindungan TKI tersebut merupakan segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan pengaturan perundang-undangan baik sebelum, selama, maupun sudah bekerja. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; 2) Peran dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat dalam hal perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga sangat penting, dimana Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam hal penyelesaian kasus-kasus yang dihadapi oleh para Pekerja Migran Indonesia tersebut, yaitu seperti memberi fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang di Deportasi, memberi fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang di PHK, hingga masalah mengenai gaji tidak sesuai dengan perjanjian kerja dan juga masalah penipuan peluang kerja ke luar negeri.